

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Jumat, 1 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Kompas (halaman 13)	Jumat, 1 Maret 2019	Pinjaman Bank Dunia untuk Fisik	Pembangunan Kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengikuti rencana induk yang sudah disusun Bersama Bank Dunia. Bank Dunia akan memberikan pinjaman Rp 1,6 triliun untuk pengembangan pariwisata secara fisik. “ Pinjaman itu tidak hanya untuk Mandalika, tetapi juga untuk Danau Toba dan Borobudur. Alokasi untuk Mandalika sekitar Rp300 miliar yang digunakan untuk pengerjaan fisik sesuai rencana induk yang sudah dibuat,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (28/2/2019).
2	Media Indonesia (halaman 20)	Jumat, 1 Maret 2019	Walhi Minta Proyek Bendungan Pamukkulu Dievaluasi	WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah agar mengkaji ulang proyek pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proyek yang masuk program strategis nasional dianggap sarat pelanggaran HAM dan berisiko terhadap kehidupan masyarakat lokal. Bendungan Pamukkulu rencananya menjadi yang terbesar ketiga di Sulsel, setelah Bendungan Bli-bli di Gowa dan Paselloreng di Wajo. Propyek raksasa ini berdiri di atas lahan seluas 640 hektare (ha), dengan masa pengerjaan antara 2017-2022.
3	Media Indonesia (halaman 19)	Jumat, 1 Maret 2019	Berita Foto	Jembatan Holtekamp yang menjadi ikon Jayapura di Jayapura, Papua.
4	Koran Tempo (halaman 20)	Jumat, 1 Maret 2019	Kementerian Bantu Depok Selesaikan Masalah Sampah	Kota Depok mendapat bantuan alat pengolahan sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tengah persoalan sampah yang tak kunjung selesai di kota tersebut. Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan alat itu untuk membantu mengurangi sampah di kotanya.
5	Bisnis Indonesia (Halaman 10)	Jumat, 1 Maret 2019	Menguji Kesiapan Segitiga Emas Reban	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan kawasan ini dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar akan dirancang paling maju dibandingkan dengan Kawasan lain di Jabar. Ini dilakukan sekaligus mengakomodasi, mulai dari relokasi industri-industri padat karya yang bertebaran di sejumlah daerah terutama di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.
6	Bisnis Indonesia (Halaman 6)	Jumat, 1 Maret 2019	PP Incar Riau & Bali	Direktur Utama PT PP Infrastruktur Didik Mardiyanto mengatakan bahwa perusahaan menjadi inisiator perusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pekanbaru Kampar (1.800 lpd) dan bali (2.500 lpd). PP Infrastruktur telah menyusun prastudi kelayakan dengan skema kerja sama bilateral atau business to business (b-to-b).

Judul	Pinjaman Bank Dunia untuk Fisik	Tanggal	Jumat, 1 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 13)		
Resume	Pembangunan Kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengikuti rencana induk yang sudah disusun Bersama Bank Dunia. Bank Dunia akan memberikan pinjaman Rp 1,6 triliun untuk pengembangan pariwisata secara fisik. "Pinjaman itu tidak hanya untuk Mandalika, tetapi juga untuk Danau Toba dan Borobudur. Alokasi untuk Mandalika sekitar Rp300 miliar yang digunakan untuk pengerjaan fisik sesuai rencana induk yang sudah dibuat," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di Jakarta, Kamis (28/2/2019).		

PARIWISATA

Pinjaman Bank Dunia untuk Fisik

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengikuti rencana induk yang sudah disusun bersama Bank Dunia. Bank Dunia akan memberikan pinjaman Rp 1,6 triliun untuk pengembangan pariwisata secara fisik.

"Pinjaman itu tidak hanya untuk Mandalika, tetapi juga untuk Danau Toba dan Borobudur. Alokasi untuk Mandalika sekitar Rp 300 miliar yang digunakan untuk pengerjaan fisik sesuai rencana induk yang sudah dibuat," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono di

Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan di kawasan Mandalika, antara lain rekonstruksi jalan Bandara Internasional Lombok ke Kuta (Mandalika) sepanjang 54,71 kilometer.

Menurut Basuki, jalan yang menghubungkan Bandara Lombok menuju kawasan Mandalika sudah mencukupi. Jalan tersebut sudah diperlebar menjadi dua jalur yang terdiri atas empat lajur dengan median pemisah. Jalan itu diyakini dapat menampung kepadatan lalu lintas, termasuk saat penyeleng-

garan MotoGP pada 2021.

Basuki menambahkan, tahun ini belum ada kebutuhan membangun jalan *bypass* dari Bandara Lombok ke Mandalika. Dana pinjaman Bank Dunia juga tidak diprogramkan untuk membangun jalan tersebut, termasuk pembebasan lahannya.

Setelah resmi ditunjuk sebagai penyelenggara MotoGP 2021, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mesti segera menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung.

"Yang perlu disiapkan adalah akses jalan truk pengangkut logistik MotoGP. Saya belum tahu pengangkutannya ke Lombok

lewat udara atau laut. Kalau lewat laut, kapal pengangkut akan bongkar-muat di Pelabuhan Gili Mas (sebelah selatan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat)," kata Kepala Dinas PUPR NTB Wedha Magma Ardhi, di Mataram, Lombok.

Menurut Ardhi, penyelenggara MotoGP membutuhkan akses jalan untuk mengangkut logistik. Rute yang disiapkan adalah jalan raya dari Bandara Internasional Lombok menuju KEK Mandalika. Jalan yang ada saat ini, selebar 11 meter, dinilai memadai untuk dilewati truk pengangkut logistik tersebut.

(NAD/RUL)

Judul	Walhi Minta Proyek Bendungan Pamukkulu Dievaluasi	Tanggal	Jumat, 1 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 20)		
Resume	WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah agar mengkaji ulang proyek pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proyek yang masuk program strategis nasional dianggap sarat pelanggaran HAM dan berisiko terhadap kehidupan masyarakat lokal. Bendungan Pamukkulu rencananya menjadi yang terbesar ketiga di Sulsel, setelah Bendungan Bli-bli di Gowa dan Paselloreng di Wajo. Proyek raksasa ini berdiri di atas lahan seluas 640 hektare (ha), dengan masa pengerjaan antara 2017-2022.		

 MAKASSAR, SULAWESI SELATAN

Walhi Minta Proyek Bendungan Pamukkulu Dievaluasi

WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah agar mengkaji ulang proyek pembangunan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proyek yang masuk program strategis nasional dianggap sarat pelanggaran HAM dan berisiko terhadap kehidupan masyarakat lokal.

Bendungan Pamukkulu rencananya menjadi yang terbesar ketiga di Sulsel, setelah Bendungan Bili-bili di Gowa dan Paselloreng di Wajo. Proyek raksasa ini berdiri di atas lahan seluas 640 hektare (ha), dengan masa pengerjaan antara 2017-2022. Total biaya proyek sebesar Rp1,7 triliun dari APBN dan utang luar negeri.

Menurut Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin, dari seluruh lahan yang ada, 200 ha

lahan berada di kawasan hutan, dan sisanya akan menenggelamkan tiga dusun di Desa Kele Komara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Bahkan, ada 312 kepala keluarga yang akan terdampak. Meski demikian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dinilai tidak peduli dengan hak-hak masyarakat yang terdampak.

"Dari kajian dan investigasi, disimpulkan bahwa pembangunan bendungan masih perlu dikaji, direvisi, dan dipertimbangkan ulang karena tidak manusiawi dan memiskinkan masyarakat," tegas Al Amin, kemarin.

Al Amin menambahkan, negara meminjam uang untuk membiayai proyek harus memenuhi persyaratan dari kumpulan bank

pembangunan internasional atau MDBs. Salah satunya, mengawali proyek dengan konsultasi publik, untuk memastikan apakah proyek disetujui masyarakat. Lewat konsultasi, masyarakat juga memberikan pandangan agar proyek tidak berdampak buruk.

Namun kenyataannya, Walhi menemukan bahwa proyek Bendungan Pamukkulu mengabaikan tahapan itu. Sebelumnya, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Suparji menjelaskan, Bendungan Pamukkulu bakal berfungsi mengairi irigasi seluas 6.430 ha. Selain itu, bendungan dapat menampung 82,7 juta meter kubik air sehingga membantu mengendalikan banjir dan menyediakan air baku. Bendungan juga bisa memberikan daya PLTA sebesar 25 mw. (LN/N-3)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 1 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 19)		
Resume	Jembatan Holtekamp yang menjadi ikon Jayapura di Jayapura, Papua.		



ANTARA/GUSTI TANATI

JEMBATAN HOLTEKAMP: Pekerja melintasi Jembatan Holtekamp yang menjadi ikon Jayapura di Jayapura, Papua, kemarin. Jembatan Holtekamp yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret ini.

Judul	Kementerian Bantu Depok Selesaikan Masalah Sampah	Tanggal	Jumat, 1 Maret 2019
Media	Koran Tempo (halaman 20)		
Resume	Kota Depok mendapat bantuan alat pengolahan sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tengah persoalan sampah yang tak kunjung selesai di kota tersebut. Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan alat itu untuk membantu mengurangi sampah di kotanya.		

Kementerian Bantu Depok Selesaikan Masalah Sampah

Sampah masih menjadi masalah besar di Depok.

Jobpie Sugiharto

jobpie@tempo.co.id

DEPOK - Kota Depok mendapat bantuan alat pengolahan sampah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tengah persoalan sampah yang tak kunjung selesai di kota tersebut. Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan alat itu untuk membantu mengurangi sampah di kotanya.

"Kami diberi mesin dengan kapasitas 3 ton per hari," kata dia di kantornya, kemarin.

Menurut dia, mesin pengolah sampah itu juga bisa memproduksi briket sebagai pengganti batu bara untuk bahan bakar beberapa pabrik dan usaha mikro, kecil, dan menengah. "Besok saya hadiri peresmian itu dari pemerintah pusat," ujarnya.

Idris menjelaskan, mesin itu akan ditempatkan di Kecamatan Sukmajaya. Sebab, selama ini, sampah organik di daerah itu tidak bisa diolah akibat keterbatasan lahan. Jumlah warga di sana mencapai 15 ribu jiwa per kilometer persegi," ucapnya.

Depok memang sedang mengalami masalah sampah. Bantuan alat dari pemerintah pun tergolong kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan Depok. Unit Pelaksanaan Teknis Tempat Pembuangan Akhir (UPTTPA) Cipayang setiap hari hanya sanggup menge-



Situ Pladen penuh sampah akibat buruknya pengolahan dari Pemkot Depok, 25 Februari lalu.

lola 850-900 ton sampah warga Depok. Padahal produksi sampah per hari lebih dari 1.000 ton. Sebelumnya, menurut Kepala UPT TPA Cipayang, Ardan, sampah warga per hari sebesar 700-800 ton.

Kenaikan jumlah sampah itu seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Depok. Setiap orang menghasilkan 0,6 kilogram sampah, sementara penduduk Depok berjumlah sekitar 2 juta jiwa. "Belum lagi sampah yang bukan dari warga lain," tuturnya.

Depok berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempercepat pembukaan Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional

Lulut-Nambo khusus untuk Kota Depok bila telah dibuka resmi pada Juli 2020. "Kota Depok meminta agar diizinkan menggunakan mulai 2019," ujar Kepala Bidang Pelayanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok, Iyay Gumilar, awal Januari lalu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Depok 2019 pun telah mengalokasikan dana khusus untuk pembuangan sampah ke Nambo sebesar Rp 10 miliar. Biaya yang harus dibayarkan sekitar Rp 138 ribu per ton. "Kalau diizinkan buang sampah, sudah ada anggarannya.

Pemohonan izin sege-

ra membuang sampah ke Nambo dipercepat sebelum dibuka secara resmi pada 2022 telah disampaikan via surat kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Surat disampaikan dua kali pada tahun lalu, yakni pada April dan Desember.

Menurut Iyay, pemberian Kementerian PUPR tersebut kini sudah berada di Unit Pengolahan Sampah Merdeka, Kecamatan Sukmajaya. Namun butuh waktu untuk mengoperasikan mesin pencacah berteknologi mutakhir itu. Mesin tersebut tak ditempatkan di TPA Cipayang karena ketiadaan lahan lantaran sampah di sana sudah menggunung

"Tahun ini bisa diguna-

kan, tapi sekarang kami diajari PUPR," ucap Iyay. "Mirip teknologi *refuse derived fuel* (RDF) di TPPAS Nambo, tapi dengan skala lebih kecil."

Iyay menjelaskan, produksi sampah Depok hingga akhir 2018 mencapai 1.300 ton per hari. Padahal,

jumlah truk sampah milik Depok hanya 115 unit, dari yang seharusnya 250 unit. Setiap truk itu berkapasitas 4-5 ton. Jumlah tenaga kebersihan juga belum mencukupi, yakni baru 1.300 orang, dari yang semestinya 2.000-2.500 orang. ● IRSYAN HASYIM

Musabab Gagal Raih Adipura

PENGHARGAAN Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lepas dari genggamannya Kota Depok pada tahun lalu. Musababnya, kota itu dinilai buruk dalam sistem pengelolaan sampah. Wali Kota Mohammad Idris realists melihat kegagalan itu.

"Menaikkan poin 0,4 saja itu sudah sulit," ujarnya di tengah acara evaluasi tiga tahun pemerintahannya di kantornya, kemarin.

Dia mengakui Depok belum masif dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya sehingga poin pemberdayaan masyarakat jadi jeblok.

Pada 10 Februari lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan standar pengolahan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Menurut dia, Kota Depok belum memenuhi standar itu sehingga gagal mendapatkan Piala Adipura pada 2018. Dia pun berjanji akan membina Kota Depok agar bisa meningkatkan kinerja di bidang lingkungan. "Paling tidak, tahun depan sudah rapi," ucapnya.

Siti Nurbaya merujuk pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayang yang masih menerapkan konsep open dumping. Artinya, 1.300 ton sampah yang datang tiap hari langsung ditumpuk tanpa diolah lebih dulu. "Itu tidak boleh menurut undang-undang."

Dia juga menjelaskan, persoalan di Cipayang menjadi faktor kedua gagalnya Depok meraih predikat kota bersih dan teduh. Faktor lainnya adalah gugatan warga di sekitar TPA Cipayang yang sampai ke pengadilan. Pemerintah Depok sampai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung dan Cisadane mengenai tuntutan warga akibat longsor sampah TPA Cipayang di Kali Pesanggrahan. Sampah yang menutupi saluran kali tersebut membuat banjir di sekitar jembatan Kelurahan Pasir Putih.

"Banjir bukan hanya karena longsor sampah, tapi juga karena kali perlu dikeruk," tutur Siti.

Pengadilan Negeri Depok menggelar sidang perdana gugatan warga Kampung Pasir Putih terhadap Pemerintah Kota Depok ihwal polusi udara dampak TPA Cipayang pada 23 Agustus 2018. Kuasa hukum warga Pasir Putih, Achmad Faisal, berharap majelis hakim memutuskan secara adil.

"Harapan kami, warga dapat memperoleh hak-haknya dan kompensasi layak yang selama ini dilanggar Pemkot Depok," ujarnya.

Menurut Idris, dalam APBD tahun ini dianggarkan proyek pembangunan jembatan Pasir Putih serta pengerukan Kali Pesanggrahan. Ia juga membeberkan tumpukan sampah di sana mencapai 23 meter, melebihi batas maksimal 20 meter. Selain itu, tahun ini Depok membeli alat berat untuk mengalihkan sampah ke sumbu buangan (landfill) yang lama. "Tapi rencana ini diprotes warga," kata Wali Kota Idris.

● IRSYAN HASYIM

Judul	Menguji Kesiapan Segitiga Emas Reban	Tanggal	Jumat, 1 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 10)		
Resume	Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan kawasan ini dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar akan dirancang paling maju dibandingkan dengan Kawasan lain di Jabar. Ini dilakukan sekaligus mengakomodasi, mulai dari relokasi industri-industri padat karya yang bertebaran di sejumlah daerah terutama di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.		

Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah merancang Kawasan Segitiga Emas Reban yaitu Patimban-Kertajati-Cirebon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur, Jawa Barat.

redaksi@bisnis.com

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa kawasan ini dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar akan dirancang paling maju dibandingkan dengan kawasan lain di Jabar.

Ini dilakukan sekaligus mengakomodasi, mulai dari relokasi industri-industri padat karya yang bertebaran di sejumlah daerah terutama di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum.

"Andi, nanti wilayah paling maju, paling futuristik, paling luar biasa ada di segitiga daerah itu. Semua industri padat karya akan kita pusatkan di daerah ini sehingga tidak terpecah-pecah lagi di seluruh Jawa Barat," ujar Gubernur Ridwan di Bandung, belum lama ini.

Dia mengatakan hingga saat ini, industri padat karya di Jawa Barat (Jabar) banyak yang pindah ke luar provinsi karena urusan upah. Dengan adanya kawasan segitiga emas

ini, pihaknya akan menahan supaya industri tidak pindah ke Jawa Tengah atau Vietnam.

"Oleh karena itu, kami menyediakan tempat yang cocok dan memadai di zona ini [Segitiga Emas Reban]," paparnya.

Menurutnya, konsentrasi pembangunan ke wilayah tersebut seiring dengan mulai dibangunnya Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, yang terkoneksi dengan tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

"Saya akan kawal opportunity ekonomi kawasan ini agar tidak berantakan," tegasnya.

Setelah urusan studi perencanaan dan kajian tata ruangnya jelas, maka pihaknya akan memperjuangkan kawasan tersebut menjadi kawasan ekonomi khusus [KEK].

Dengan status ini, dia berharap dana APBN bisa terlibat, lalu pengusaha dimudahkan dengan urusan izin dan pajak. "Tahun ini

kami akan mulai studi perencanaan, konstruksinya mungkin tahun depan. Dengan demikian, pada tahun ketiga sudah bisa pindah pindah," paparnya.

Selain menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru, Segitiga Reban pun dianggap menjadi ruang yang tepat relokasi industri sekaligus mengadopsi rencana pengusaha beralih ke Jawa Tengah.

Emil, sapaan akrabnya mengaku makin tingginya kenaikan upah setiap tahun membuat jarak antara upah di kawasan barat dan timur di Jabar semakin jomplang.

Dia memastikan bahwa relokasi akan tetap diprioritaskan pada industri di kawasan Citarum. Menurutnya, kawasan tersebut sudah tidak lagi cocok bagi industri, mengingat urusan limbah masih terus menjadi persoalan.

"Kalau pindah ke Majalengka, mereka akan berkumpul di kompleks industri. Dengan demikian, IBAL-nya tidak satu-satu tapi oleh fasilitas," tuturnya.

TAHAP SOSIALISASI

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Taufiq BS memastikan bahwa Segitiga Emas Reban sudah dalam tahap sosialisasi pada kabupaten/kota di kawasan tersebut.

"Supaya kolaborasi dengan kabupaten/kota, kami akan menyusun konsep pengembangan yang lebih matang karena harus sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota," ujarnya kepada *Bisnis*.

Dari hasil analisis sementara di 3 wilayah tersebut, ada setidaknya 30 calon lokasi yang dari aspek tata ruang memiliki kesesuaian seperti berada di luar kawasan sawah dan hutan lindung.

Sepuluh calon lokasi ini di RTRW daerah diperuntukkan bagi kota baru dan permukiman pedesaan. "Ini coba kami identifikasi termasuk pemukiman perkotaan," ujarnya.

Selanjutnya, setelah diidentifikasi awal, kawasan yang berwujud kota baru ataupun KEK, nantinya Indramayu memiliki 3 lokasi, Sumedang 1 lokasi, Majalengka 1 lokasi, Subang 4 lokasi dan sisanya

Kabupaten Cirebon.

Sepuluh lokasi yang dibidik ini, menurutnya, sudah ada dalam tata ruang kabupaten/kota. "Ini yang kira-kira memenuhi syarat," tuturnya.

Menurutnya, gubernur juga meminta agar tim pengkajian juga turut membahas terkait dengan sistem transportasi dan utilitas agar terintegrasi dalam rencana RTRW.

Kesepuluh lokasi sendiri tidak berada di satu hamparan tetapi terpisah-pisah di 3 wilayah tersebut. "Misalkan Kota Baru yang di Patimban, di RTRW Subang sudah ada alokasi kurang lebih 5.500 sekan hektar," tuturnya.

Sementara itu, lokasi yang berada di Aerocity Kertajati paling tidak sudah disiapkan 3.480 hektare (ha) ditambah dengan perencanaan sebelumnya yang mencapai 9.600 ha.

Terkait dengan badan pengelola, pihaknya juga menguji kemungkinan ada badan otorita khusus yang mengelola kawasan ini. "Kelembagaan untuk keterpaduan pengelolaan kawasan, memang itu salah satu yang harus kami tempuh," katanya.

HARUS TAAT

Direktur Pengembangan Kawasan dan Wilayah Bappenas Sumedi Ardono Mulyo mengapresiasi langkah serius Pemprov Jabar membangun Kawasan Segitiga Reban. Sumedi memastikan bahwa kawasan baru ini dibutuhkan mengingat sudah menjamahnya industri di kawasan Jakarta-Bekasi-Karang (Jababeka).

"Kita harus mencari pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga [Segitiga Reban] ini jadi pusat pertumbuhan yang akan menjadi penyangga, penyeimbang Jababeka," katanya belum lama ini.

Dia menambahkan, kawasan Jababeka dirasakan sudah terlalu jenuh. Adapun masalahnya berkaitan dengan akses ke pasar ekspor. "Transportasi melalui pelabuhan menjadi sangat penting," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan pada Pemprov Jabar jika hendak mengusung konsep Segitiga Emas Patimban, Kertajati, Cirebon, sejumlah persyaratan harus terpenuhi. *Pertama*, terkait dengan urusan rencana tata ruang dan wilayah yang harus taat. *Kedua*, soal pengelolaan.

Dia menuturkan Pemprov Jabar punya tugas bagaimana manajemen pengelolaan ini berjalan dengan baik. Kalau diberikan kepada aparat

yang tidak biasa mengurus kawasan itu, dikhawatirkan akan jadi sangat menghambat.

"Manajemen pengelolaan itu harus dipikirkan juga. Ketiga, soal *anchor investor*, harus ada investor yang masuk di situ," katanya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Wijaya mendesak Pemprov untuk serius menyediakan lahan dan kawasan ekonomi khusus (KEK) industri.

Ini dilakukan jika Pemprov hendak mengeksekusi wacana relokasi ke kawasan Segitiga Reban. "[Ketelitian] Pengusaha sebenarnya ingin pindah ke Jabar [bagian] timur," katanya.

Kawasan timur yang terbentang dari mulai Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon dan Kuningan, menurutnya, sudah lama diminati pengusaha karena makin kompleksnya persoalan industri di wilayah barat.

Masalah tersebut terutama untuk urusan upah yang terus naik setiap tahun. "Jadi, mereka berharap industri bisa masuk ke sana dengan upah yang murah," ujarnya.

Selain itu, pihaknya mengaku sudah meminta agar relokasi industri ditempatkan dalam kawasan khusus seperti KEK industri agar pengusaha mendapatkan banyak kemudahan dari pemerintah daerah maupun Pusat.

"Gubernur sudah bersedia membantu. [KEK] ini jadi magnet pengusaha agar mau pindah," tuturnya.

Ekonomi Batan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Acuvirta Kartabi memuji langkah Pemprov Jabar menjadikan kawasan Subang, Majalengka, dan Cirebon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jabar ke depan.

Hal itu dilakukan mengingat kawasan tersebut saat ini merupakan klaster kemiskinan yang cukup tinggi. "Segitiga Reban bagus, karena ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Namun, pihaknya mewanti-wanti, agar gembir-gembir kawasan pertumbuhan baru ini bukan melulu urusan fisik infrastruktur semata. Menurutnya, provinsi jangan sampai habis energi hanya untuk persiapan pembangunan fisik tetapi tidak mendorong daerah untuk satu visi.

"Infrastruktur kadang-kadang ramai hanya di atas, sedangkan di tingkat daerahnya tidak inovatif," katanya.

Agar Investor Tidak Kabur dari Jabar

Segitiga Emas Reban atau Patimban-Kertajati-Cirebon ditargetkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi kawasan yang paling prospektif bagi sektor ekonomi Jabar dan membawa keuntungan besar bagi investor.

Kawasan ini juga dibangun agar industri manufaktur yang mulai kesulitan dengan lingginya upah minimum provinsi (UMP) di Jabar tetap bertahan di segitiga emas sehingga tidak lari ke luar Jabar.

Lokasi



Patimban
5.500 hektar
(RTRW Subang)

Fasilitas:
Pelabuhan dan Bandara Internasional, KEK, dan jalan tol

Cirebon
10.000 hektar
(RTRW Cirebon)

Kertajati Aerocity
(3.480 hektar) dimungkinkan hingga 9.600 hektare

Kesiapan Lahan Segitiga Emas Reban

Sumber: Bappeda Jabar, 2019

BISNISINDONESIA.COM

Judul	PP Incar Riau & Bali	Tanggal	Jumat, 1 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 6)		
Resume	Direktur Utama PT PP Infrastruktur Didik Mardiyanto mengatakan bahwa perusahaan menjadi inisiator pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pekanbaru Kampar (1.800 lpd) dan bali (2.500 lpd). PP Infrastruktur telah menyusun prastudi kelayakan dengan skema kerja sama bilateral atau business to business (b-to-b).		



PROYEK AIR MINUM

PP Incar Riau & Bali

Bisnis, JAKARTA — PT PP Infrastruktur membidik kerja sama pengusahaan sistem penyediaan air minum di dua lokasi dengan kapasitas gabungan 4.100 liter per detik.

Riki Maulana
rki.maulana@bisnis.com

Direktur Utama PT PP Infrastruktur Didik Mardiyanto mengatakan bahwa perusahaan menjadi inisiator pengusahaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pekanbaru-Kampar (1.800 lpd) dan Bali (2.300 lpd). PP Infrastruktur telah menyusun prastudi kelayakan dengan skema kerja sama bilateral atau business to business (b-to-b).

Didik menambahkan bahwa perusahaan belum bisa memastikan penyelesaian proses kerja sama di dua proyek SPAM tersebut. Dia berharap agar proses administrasi dan pelelangan bisa berlangsung cepat.

Hingga saat ini, PP Infrastruktur sedikitnya sudah terlibat pada dua proyek pengusahaan SPAM di Tangerang Selatan (SPAM Kali Angke) dan Bekasi (SPAM Jatisari).

"SPAM Jatisari dan SPAM Kali Angke saat ini masih dalam tahap konstruksi," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (28/2).

Di bidang air minum, PP Infrastruktur mengaku membidik proyek-proyek potensial dengan kapasitas yang be-

PP Infrastruktur lebih menyukai proyek-proyek dengan kapasitas air yang besar karena skala keekonomiannya lebih layak.

Hingga 2017, BPPSPAM mencatat ada 29 proyek kerja sama yang terlaksana dalam bentuk kerja sama antarbadan usaha maupun KPBU.

Namun, Didik menyebutkan bahwa perusahaan lebih menyukai proyek-proyek dengan kapasitas air yang besar karena skala keekonomiannya lebih layak.

Secara umum, proyek-proyek air minum ke depan bakal tetap meningkat.

Menurut Didik, periode kerja sama di proyek air minum lebih pendek dibandingkan dengan proyek infrastruktur seperti jalan tol. Walaupun, waktu pengembalian investasi juga lebih singkat.

Di sisi lain, permintaan air terus akan terus meningkat seiring dengan

peningkatan jumlah penduduk.

"Tarif air juga sudah diatur lewat pemerintah [peraturan Mendagri]. Jadi, sudah layak secara finansial," ujarnya.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, PP Infrastruktur yang merupakan anak usaha PT Pembangunan Perumahan Tbk, bekerja sama dengan PT Pembangunan Infrastruktur Tangerang Selatan di SPAM Kali Angke dengan membentuk PT Tirta Tangel Mandiri.

Direktur Utama PT Pembangunan Infrastruktur Tangerang Selatan Dandung E. Diredja mengatakan bahwa kerja sama pengusahaan dengan PP Infrastruktur berlangsung selama 30 tahun.

Menurutnya, konstruksi SPAM Kali Angke berkapasitas 200 lpd dihabiskan selesai pada 2021 dan bisa melayani 33.000 sambungan rumah atau setara 167.000 jiwa. Cakupan layanan air minum itu meliputi Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, dan Kecamatan Pamulang.

Sementara itu, di proyek SPAM Jatisari, PP Infrastruktur membangun SPAM berkapasitas 200 lpd yang bisa melayani 108.000 penduduk di tiga kecamatan Kota Bekasi. Dalam proyek ini, PP Infrastruktur bekerja sama dengan PDAM Tirta Patriot dengan skema bangun, serah, guna berdurasi 20 tahun.

RENCANA KERJA SAMA

Sebelumnya, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum menyatakan bahwa badan tersebut bakal mendampingi penyiapan 10 rencana kerja sama di sektor air minum pada tahun ini.

Anggota Unsur Profesi BPPSPAM Poppy Indrawati Janto mengatakan bahwa rencana kerja sama dilakukan dalam dua skema yakni skema antarbadan usaha dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Sampai Januari 2019, PDAM yang meminta pendampingan BPPSPAM untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta ada 10 PDAM [perusahaan daerah air minum]," ujarnya kepada *Bisnis*, beberapa waktu lalu.

Di antaranya rencana kerja sama perusahaan daerah air minum dengan pihak swasta antara lain berlokasi di Bawakara, Kota Bandung, Kabupaten

Bandung, dan Kabupaten Bogor.

Di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung, rencana kerja sama meliputi pengembangan SPAM dengan skema antarbadan usaha. Dua rencana kerja sama itu masing-masing meliputi pengembangan SPAM berkapasitas 150 lpd dan 200 lpd.

Sementara itu, di Kota Bandung, rencana kerja sama berada dalam lingkup penurunan non-revenue water (NRW) atau tingkat kehilangan air. Berdasarkan catatan *Bisnis*, kerja sama ini digagas oleh perusahaan air minum asal Filipina, Manila Water Company Inc.

Sebelumnya, Country Head Manila Water Indonesia Pieter L. Tibing mengatakan bahwa perusahaan sedang menyiapkan studi kelayakan yang akan menjadi modal prakarsa dari badan usaha atau swasta.

"Kami berharap agar prosesnya bisa cepat. Artinya tahun ini, tetapi bisa bukan di tangan kami," katanya.

Menurut Pieter, skema kerja sama dengan PDAM Tirtawaring akan menggunakan kontrak berbasis kinerja atau performance based contract.

Kebutuhan investasi dalam kerja sama menekan tingkat kehilangan air di Kota Bandung diperkirakan di kisaran Rp220 miliar hingga Rp250 miliar.

BPPSPAM juga mendampingi empat proyek kerja sama yang sudah masuk tahap persiapan.

Keempat proyek itu adalah pembangunan instalasi pengolahan air PDAM Kota Tangerang (1x500 lpd), PDAM Subang (2x100 lpd), PDAM Kota Kendari (2x250 lpd), dan PDAM Kota Makassar (2x300 lpd).

Secara umum, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat melansir bahwa investasi untuk memenuhi akses air minum 100% mencapai Rp255,80 triliun. Dari jumlah itu, APBN hanya bisa memenuhi kebutuhan investasi 26%.

Hingga 2017, BPPSPAM mencatat ada 29 proyek kerja sama yang terlaksana dalam bentuk kerja sama antarbadan usaha maupun KPBU.

Kerja sama tersebut menghasilkan kapasitas SPAM sebanyak 36.330 lpd dan diestimasi melayani 2,52 juta sambungan pelanggan. Total investasi dari kerja sama dengan badan usaha swasta itu mencapai Rp8,60 triliun. □

Partisipasi Swasta Diperlukan

Langkah PT PP Infrastruktur membidik pengusahaan air minum lewat beragam skema kerja sama sejalan dengan niat pemerintah dalam meningkatkan akses air minum layak. Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat melansir bahwa kebutuhan kebutuhan pendanaan untuk memenuhi akses air minum 100% mencapai Rp254 triliun. Negara tak sanggup menyediakan anggaran sebanyak itu. Perse pemerintah pusat untuk mendanai proyek air minum hanya mencapai 26% dari kebutuhan investasi. Sisa kebutuhan pendanaan diherapkan dari APBD dan swasta.

Portofolio PP Infrastruktur di Sektor Air Minum

Nama Proyek	Lokasi	Entitas Pelaksana	Kapasitas (liter/detik)	Cakupan Pelayanan (jiwa)
SPAM Kali Angke	Tangerang	PT Tirta Tangel Mandiri	200	167.000
SPAM Jatisari	Bekasi	PT Tirta Tangel Mandiri	200	108.000